

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah ialah salah satu bidang akuntansi sektor publik yang telah menarik banyak perhatian dari berbagai pemangku kepentingan sejak akhir tahun 1990-an. Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan kebijakan baru untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai akibat dari sistem manajemen yang buruk di era Orde Baru. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. (Machfuda & MM., 2021)

Mengenai pelaporan dan akuntabilitas, bendahara yang mengeluarkan dana membuat laporan akuntabilitas administrasi dan fungsional yang mencakup ringkasan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Laporan ini mencakup laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu, laporan penutupan kas, dan buku kas umum. Selain itu, dengan menyatakan fakta penerapan UP (Uang Persediaan) atau TU (Tambah Uang), bendahara yang mengeluarkan dana membuat laporan tentang akuntabilitas penggunaan UP (Uang Persediaan) dan TU (Tambah Uang). (Dali et al., 2023)

Menerima, menyimpan, membayar, mencatat, dan mengakui pengeluaran finansial adalah tanggung jawab bendahara pengeluaran. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan terhadap PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan setelahnya. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bendahara pengeluaran sangat terkait, tanggung jawab ini adalah cara bagi seorang bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajibannya. Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana), surat pernyataan pengguna anggaran draf, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), bukti transaksi, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan UP (Uang Persediaan) atau TU (Tambah Uang), serta dokumen pendukung sebagainya adalah dokumen yang digunakan. Buku kas umum dan buku-buku pembantu digunakan untuk pencatatan. (Dali et al., 2023)

Sumber daya manusia ialah sebuah perhimpunan utama. Akuntabilitas diperlukan untuk tugas administrasi keuangan, dan ini dicatat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Jika sumber daya manusia yang terbatas, maka proses pembuatan surat pertanggungjawaban membuat lebih sulit untuk dikumpulkan. Sumber daya manusia (SDM) harus memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Logika akuntansi akan lebih sederhana untuk dipahami oleh sumber daya manusia yang terampil. Jika departemen Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah tidak tahu dan menggunakan teori akuntansi, laporan keuangan tidak akan memenuhi standar pemerintah dan akan disajikan dengan cara yang salah. Kemampuan seseorang, kelompok, atau sistem untuk memenuhi tugas-tugasnya guna mencapai tujuan secara efektif dan berhasil adalah salah satu komponen dari kompetensi sumber daya manusia. Kemampuan untuk melakukan, menghasilkan keluaran, dan memberikan hasil harus dianggap sebagai kemampuan. (Dali et al., 2023)

Menurut Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara adalah pejabat fungsional yang mewakili Menteri Keuangan dalam mengawasi keuangan negara dan tidak boleh terpengaruh secara struktural oleh atasan mereka, bendahara yang diangkat harus mampu mengelola keuangan daerah. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari satuan kerja daerah berfungsi sebagai jenis laporan keuangan pemerintah daerah tahunan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), disusun menggunakan bukti transaksi pengeluaran yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, kesalahan dalam SPJ menjadi krusial selama proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. (Nilawati, 2009). Pengelolaan, pengawasan, serta pengarahan sumber daya suatu organisasi dikenal sebagai pengendalian internal. Kebijakan dan proses yang ditetapkan oleh organisasi membentuk pengendalian internal. Pengendalian internal berfungsi untuk menjamin bahwa sumber daya berfungsi sesuai dengan protokol yang ditetapkan, sehingga memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. (Malikah, 2021)

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serayu Citanduy merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air wilayah Serayu Citanduy. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai PSDA tidak hanya bertanggung jawab pada aspek teknis, namun juga pada tata kelola administrasi keuangan, khususnya dalam hal pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran. Sistem pelaporan SPJ menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Keduanya menjadi faktor utama dalam menjamin keakuratan, kelengkapan, dan keandalan informasi keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya, sering ditemukan kendala yang berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur, keterbatasan SDM, serta lemahnya pengawasan internal. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap penerapan sistem laporan SPJ pengeluaran, khususnya ditinjau dari aspek SDM dan pengendalian internal, guna mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya di Balai PSDA Serayu Citanduy.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran pada Balai PSDA Serayu Citanduy?
2. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) mendukung pelaksanaan sistem laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran?
3. Bagaimana efektivitas pengendalian internal dalam menunjang akurasi dan akuntabilitas laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran?

## **3. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran pada Balai PSDA Serayu Citanduy.
2. Untuk menganalisis peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pelaksanaan sistem laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran.
3. Untuk menilai efektivitas pengendalian internal terhadap penyusunan laporan Surat Pertanggungjawaban pengeluaran.

#### 4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan sejauh mana kemampuan teknis SDM pada Balai PSDA Serayu Citanduy, serta memperkuat pengendalian internal agar terhindar dari risiko penyimpangan. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas laporan SPJ pada Balai PSDA Serayu Citanduy. Karena dengan SDM yang kompeten dan pengendalian intern yang kuat, laporan SPJ akan lebih tepat, tidak terlambat serta sesuai dalam ketentuan yang ada.

#### 5. Batasan Masalah

Tujuan proyek akhir ini adalah untuk memeriksa bagaimana pengendalian internal dan sumber daya manusia memengaruhi kualitas laporan SPJ yang dihasilkan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serayu Citanduy, dengan penekanan khusus pada tahun anggaran 2025. Hanya dua variabel independen yang akan menjadi subjek penelitian ini: pengendalian internal, yang mencakup sistem pelaporan, prosedur pengawasan, dan mekanisme pemeriksaan internal untuk laporan SPJ; dan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup kompetensi, pengalaman kerja, dan pemahaman tentang SPJ di antara karyawan yang terlibat dalam penyusunan SPJ.

#### 6. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

**Tabel 1. 1** Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Tahap Persiapan</b>																	
1	Melakukan observasi ke tempat PKL	✓															
2	Meminta surat pengantar dari fakultas	✓															

3	Konfirmasi persetujuan dari tempat PKL		✓															
4	Mengajukan judul Tugas Akhir						✓											
<b>Tahap Pelaksanaan</b>																		
5	Pelaksanaan praktik kerja lapangan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
6	Melaksanakan wawancara kepada pegawai terkait pekerjaan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
7	Melakukan observasi dan praktik kerja lapangan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
<b>Tahap Pelaporan</b>																		
8	Pengumpulan data-data pendukung										✓	✓	✓					
9	Penyusunan Tugas Akhir													✓	✓	✓	✓	